

## 1. PENGELOLAAN KEORGANISASIAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL

Membangun sebuah organisasi baru hampir sama halnya dengan mendirikan sebuah bangunan. Apalagi organisasi yang didirikan ini adalah tempat berhimpunnya diaspora Aceh dari banyak pelosok dunia, malahan dari berbagai kewarganegaraan, yang anggotanya diperkirakan lebih dari 1 juta orang. Sebagian di antaranya adalah para pemuka di lingkungannya, profesional dan ilmuwan kelas dunia. Tentu diperlukan 'bangunan' besar dan *sophisticated* untuk mengakomodasikan keperluan itu.

Namun seperti biasa dalam keseharian di organisasi sosial non-profesional, jumlah aktivis yang terlibat serius bisa dihitung jari dari sebelah tangan saja. Bahkan untuk meng-handle pekerjaan klerikal dan teknikal sehari-hari pun, Diaspora Global Aceh (DGA) cuma bisa meng-*hired* seorang karyawan sekretariat selama kurun waktu 5 (lima) bulan pertama. Selebihnya, syukurlah banyak dibantu oleh Saudara Danang Suharyadi dari Sekretariat Yayasan Malem Putra. Yayasan yang juga membantu fasilitas operasional dan pembiayaan kepada DGA. Terimakasih.

Dalam kondisi seperti itulah DGA didirikan. Dari samasekali tidak ada apa-apanya, kini satu tahun kemudian sudah berbentuk organisasi resmi yang relatif established dan berfungsi *systemized*.

Beberapa kegiatan dan capaian yang berkaitan dengan proses pembentukan dan pengelolaan keorganisasian oleh Sekretariat Jenderal selama ini, antara lain terdiri dari:

### 1.1. Perumusan Disain Organisasi, Statuta dan Garis Besar Kebijakan Organisasi

Bermula dari hanya sebuah daftar 13 orang susunan pengurus – yang disusun oleh formatur – pengelolaan ini beranjak.

Langkah awal yang dikerjakan adalah merancang desain bangunan dan struktur organisasi, merumuskan kebijakan dan strategi organisasi; serta memformulasikan Statuta sebagai panduan konstitusional. Naskah Statuta DGA menggabungkan konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjadi sebuah kesatuan, sebagai pedoman konstitusional tertinggi dalam menyelenggarakan kegiatan berorganisasi.

Juga merumuskan Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO), sebagai panduan strategis dan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja.

Statuta dan GBKO yang disusun tersebut terlebih dahulu dibahas Rapat Dewan Pengurus Pusat (RDPP), dan telah disahkan pada Kongres I DGA/ 26 Desember 2021, menjadi panduan organisasi yang mengikat dalam penyelenggaraan DGA.

### 1.2. Meresmikan Pembentukan DGA melalui Akte Notaris

Berdasarkan naskah Statuta dan konsep pendiriannya, yang telah disepakati secara internal, menjadi dasar pembentukan Diaspora Global Aceh berbadan hukum Perkumpulan, dan diresmikan melalui Akte Notaris Saifullah SH, No.: 01, tanggal 2 November 2021

Sesuai dengan Akte Notaris tersebut, DGA didirikan pada tanggal 22 Agustus 2021, bertempat di Gedung Menara Batavia, Lt 17, dengan pendirinya tercatat Mustafa Abubakar, Said Mustafa, T. Anwar Djohansyah, Surya Darma Zainal Abidin, dan Sofyan A. Djalil.

Beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengurusan aspek legal ini, antara lain:

1. Notulen Rapat Pendirian, ditandatangani oleh Pendiri DGA bertanggal 22 Agustus 2021

2. Akta Pendirian Perkumpulan Diaspora Global Aceh Nomor: 01, tanggal 02 November 2021
3. Surat Pernyataan Pendiri perihal Modal Awal Perkumpulan
4. Surat Pernyataan Pendiri mengenai Domisili
5. Surat Pernyataan Pendiri perihal Tidak Dalam Sengketa
6. Surat Pernyataan Pendiri perihal Program Kerja
7. Surat Pernyataan Pendiri perihal Tidak Merugikan Masyarakat, Bangsa, dan Negara
8. Surat Pernyataan Pengurus Pusat DGA perihal Kesiapan menjadi Pengurus

### 1.3. Mengurus Pengesahan Badan Hukum DGA dari Kemenkumham

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, DGA sebagai badan hukum Perkumpulan perlu mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Maka melalui pengurusan di Kementerian Hukum dan Ham, DGA secara resmi telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014326.AH.01.07.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Diaspora Global Aceh, tanggal 14 Desember 2021.

### 1.4. Pembentukan *Chapter* dan Kepengurusannya

Sesuai dengan ketentuan Statuta DGA Pasal 12, bahwa Struktur kepengurusan DGA terdiri dari kepengurusan Pengurus Pusat dan Pengurus *Chapter* (=Sagoë); sementara Pasal 16 menyebutkan, *Chapter* dibentuk berdasarkan wilayah teritorial sebuah negara atau lebih yang berada di luar yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kepengurusan *Chapter* merupakan sebuah kesatuan dalam struktur kepengurusan DGA. Tanpa *Chapter*, kepengurusan ini menjadi belum lengkap.

Karena itu, guna melengkapi struktur kepengurusan tersebut, sejak terbentuknya organisasi ini, proses sosialisasi keberadaannya terus digaungkan kepada semua pihak. Terutama kepada para diaspora Aceh yang berada di luar negeri, dengan mengundang mereka untuk menjadi bagian dari DGA.

Setelah melalui diskusi panjang dengan para diaspora Aceh dari banyak negara, dengan terlebih dahulu mendalami Statuta - GBKO, serta dimusyawarahkan secara intensif di kalangan mereka, sampai sekarang sudah resmi dibentuk 17 *Chapter* dan pengesahan kepengurusannya. Sementara untuk Inggris, Belanda dan Filipina masih dalam proses.

Mereka tersebar dari 5 benua: Asia, Afrika, Amerika, Australia dan Eropa; yang terdiri dari: Daftar *Chapter/ Sagoë*:

Benua	Negara	Tanggal Pembentukan
1 Asia	Qatar	18 November 2021
	Brunei Darussalam	06 Desember 2021
	Saudi Arabia	14 Desember 2021
	Yordania	15 Desember 2021
	Malaysia-Singapura	15 Desember 2021
	Yaman	18 Desember 2021
	Jepang	20 Desember 2021

2 Afrika	Libya	1 Desember 2021
	Sudan	06 Desember 2021
	Tunisia	23 Desember 2021
	Mesir	25 Desember 2021
3 Eropa	Jerman	9 Desember 2021
	Turki	18 Desember 2021
	Skandinavia	18 Desember 2021
4 Australia	Australia	11 Desember 2021
5 Amerika	Amerika Serikat	6 Desember 2021
	Kanada	11 Desember 2021

Sebagai organisasi baru, DGA juga harus mengurus banyak perangkat normatif sebagaimana berlaku. Termasuk semua persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Domisili, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NIB (Nomor Induk Berusaha), rekening Bank, dan lain-lain. Semuanya sudah selesai diproses, sebagai persyaratan administrasi yang diperlukan guna keperluan operasional organisasi dari aspek kelengkapan legalitas administrasi.

#### 1.5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Fisik Kesekretariatan

Sebagai organisasi baru DGA masih menumpang di kantor Yayasan Malem Putra (YMP), berlokasi di Menara Batavia, It 17, Jakarta Pusat. Untuk menunjang kegiatan administrasi dan operasional, DGA perlu mempersiapkan semua sarana dan prasarana kerja serta peralatan/ perlengkapan administrasi satu persatu, yang siap dipergunakan. Mengingat keterbatasan yang ada, sebagian di antaranya masih berupa pinjam-pakai.

#### 1.6. Perumusan Konsepsi Sistem Manajemen dan Prosedur Organisasi

Prasyarat utama keberlangsungan *good governance* di semua organisasi dan institusi adalah keharusan adanya konsepsi Sistem Manajemen dan Prosedur Organisasi, yang diimplementasikan secara benar. DGA sudah dalam proses menerapkannya, dengan mengharuskan segala sesuatunya dikerjakan secara terencana dan *systemized* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Walaupun, Sistem dan Prosedur Organisasi secara tertulis masih belum dibukukan.

#### 1.7. Menata dan Mengelola Mekanisme Kerja Kesekretariatan

Sebagai implementasi mikro dari konsepsi Sistem Manajemen dan Prosedur Organisasi DGA, mekanisme kerja di sekretariat sudah diusahakan maksimal dapat berfungsi secara *proper*, di tengah berbagai keterbatasan sumberdaya dan sumberdana yang ada.

#### 1.8. Mempersiapkan Kongres DGA I

Sesuai prosedur organisasi yang berlaku, DGA sudah menyelenggarakan Kongres DGA I pada 26 Desember 2021 lalu. Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, Kongres berwenang untuk:

- 1) Menetapkan dan/ atau merubah Statuta DGA;
- 2) Menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi;
- 3) Memilih dan menetapkan formatur yang bertugas menyusun kepengurusan;

- 4) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat;
- 5) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Kongres DGA I diselenggarakan bersamaan dengan peringatan 17 Tahun Peristiwa Tsunami Aceh, diselenggarakan secara *hybrid* di Kantor Kementerian ATR/ BPN RI. Tema Kongres I DGA: “Menghimpun yang Terserak dan Menjemput yang Tertinggal untuk Aceh Bermartabat”.

Ketua Pelaksana Kongres Joefly J. Bahroeny antara lain menyampaikan, bahwa Kongres ini dimaksudkan guna membangun silaturahmi, kesepahaman dan kesepakatan-kesepakatan yang akan menjadi tonggak bagi langkah-langkah DGA ke depannya.

Sementara Ketua Dewan Kehormatan DGA, Sofyan A. Djalil berpesan mengenai banyaknya nilai-nilai orang Aceh yang bagus. Kekuatan orang Aceh adalah sangat kreatif dan egaliter. Karena itu, ia menyarankan agar DGA jangan terlalu dominan. Kalau terlalu dominan, berpotensi menimbulkan perpecahan. Diusulkan, DGA menjadi konfederasi saja, terhadap masing-masing organisasi Aceh serantau, yang memiliki keunikan dan kelebihan sendiri. DGA menjadi forum untuk mempersatukan gagasan-gagasan. Hal itu juga untuk menghindari perpecahan.

Belajar dari sejarah Aceh, yang tidak pernah ada kerajaan terpusat. Semua kerajaan di Aceh adalah kerajaan konfederasi. Raja-raja di Pidie, Samalanga, Perlak dan lain-lain adalah raja-raja independen, hanya membayar cukai ke raja Aceh. Ini bukti bahwa sudah ratusan tahun orang Aceh adalah orang yang independen, tidak bisa menghargai hirarki secara berlebihan. Mungkin itu juga barangkali yang menjadi akar dari beberapa masalah konflik di Aceh, banyaknya konsolidasi terpusat sehingga banyak orang tidak bisa terima.

Hal tersebut berbeda sekali dengan sejarah Jawa yang terkonsolidasi. Memang, melalui terkonsolidasi ada modal sosial karena ketaatan kepada pimpinan dan hirarki.

Dalam Sidang Pleno, Ketua Umum DGA Mustafa Abubakar dan Sekjen Said Mustafa menjelaskan secara komprehensif tentang organisasi DGA, dari mulai latar belakang pendirian organisasi, visi-misi, struktur, prosedur dan mekanisme, serta legalitas DGA.

Kongres DGA I menghasilkan Keputusan-Keputusan sebagai berikut:

- Keputusan Nomor: 001/DGA/Kongres-I/XII/2021 Tentang Tata Tertib dan Agenda Kongres I Diaspora Global Aceh
- Keputusan Nomor: 002/DGA/Kongres-I/XII/2021 Tentang Pembentukan Organisasi Diaspora Global Aceh (DGA).
- Keputusan Nomor: 003 /DGA/Kongres-I/XII/2021 Tentang Pengesahan Statuta Organisasi Diaspora Global Aceh (DGA).
- Keputusan Nomor: 004/DGA/Kongres-I/XII/2021 Tentang Pengesahan Kepengurusan Organisasi Organisasi Diaspora Global Aceh (DGA).
- Keputusan Nomor: 005/DGA/Kongres-I/XII/2021 Tentang Pembentukan *Chapter/* Sagoe Dan Pengurus *Chapter/* Sagoe Diaspora Global Aceh (DGA).
- Keputusan Nomor: 006/DGA/Kongres-I/XII/2021 Tentang Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO) DGA.

## 1.9. Menyelenggarakan Kegiatan Saweue Sagoe

Guna membangun silaturahmi, saling mengenal, berbagi informasi, dan menyerap informasi dari para diaspora Aceh dari berbagai kawasan, DGA menyelenggarakan pertemuan secara periodik, berupa *Saweue Sagoe*. Pertemuan dapat diselenggarakan bertepatan dengan kunjungan para diaspora ke Indonesia, atau secara virtual.

Beberapa *event Saweue Sagoe* yang pernah diselenggarakan, antara lain: Bersama Sagoe Malaysia & Singapura (8 Desember 2021), Maroko, Canada, dan Saudi Arabia (9 Desember 2021), Skandinavia (16 Desember 2021), Jepang (17 Desember 2021), Kanada (23 Mei 2022), USA (12 Juli 2022), Calon Sagoe Filipina (26 Agustus 2022), Kawasan Afrika (20 Oktober 2022), Calon Sagoe Inggris (28 Oktober 2022 dan 12 November 2022).

## 1.10. Sosialisasi dan Silaturahmi memperkenalkan DGA

Dalam upaya mensosialisasikan DGA sebagai organisasi baru dan menyerap aspirasi dan gagasan dari banyak pihak, Dewan Pengurus Pusat melakukan silaturahmi kepada beberapa tokoh masyarakat Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertemuan dalam rangka pengenalan DGA dan audiensi ini antara lain berlangsung bersama:

- Gubernur Provinsi Aceh Nova Iriansyah, pada tanggal 20 Oktober 2021. Pertemuan tersebut sekaligus mengundang yang bersangkutan untuk hadir dalam Kongres DGA I sekaligus peringatan 17 tahun Tsunami Aceh,
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2021 diwakili oleh Asisten 2 Pemprov DKI Jakarta,
- Menteri ATR/Kepala BPN RI Dr. Sofyan A. Djalil, pada tanggal 16 November 2022, dalam hal ini juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan DGA.
- Bapak H.M. Jusuf Kalla, pada tanggal 29 November 2021 dan 08 Agustus 2022, di kedimannya Jl. Brawijaya 6, Jakarta Selatan. Pada audiensi pertama DPP DGA mengundang untuk hadir dalam acara peringatan 17 Tahun Tsunami di Aceh dan Kongres DGA I. Sementara pada audiensi kedua, bertujuan mengundang beliau untuk hadir dalam penyelenggaraan Peringatan MoU Helsinki, dengan tema: "Perdamaian Aceh Dalam Bingkai KelIndonesiaan". Beliau hadir pada kedua acara tersebut.

## 1.11. Anugerah Diaspora Aceh

Sebagai salah satu upaya mengapresiasi para 'pejuang Aceh' dalam berbagai bidang, DGA merencanakan penganugerahan diaspora award. Untuk sementara award ini dinamakan "Anugerah Diaspora Aceh". Hal ini sekaligus dimaksudkan sebagai salah satu kegiatan dari program *branding* organisasi ini.

Anugerah tersebut dimaksudkan dapat diberikan setahun sekali secara sangat selektif, hanya kepada para calon yang memenuhi kualifikasi kriteria yang ditentukan sangat ketat oleh Team Penilai yang khusus dibentuk oleh DGA untuk itu. Diperkirakan akan ada sekitar 5 kategori, sepanjang ada calon yang sesuai dan lolos seleksi. Masing-masing kategori memiliki sejumlah kriteria dengan pembobotan tertentu, dimaksudkan agar Anugerah Diaspora Aceh ini benar-benar menjadi penghargaan yang bergengsi. Diberikan berdasar

kualifikasi yang sesuai dengan wawasan DGA.

Sebenarnya, kegiatan ini diharapkan sudah mulai berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat tahunan I 2022. Rancangan konsepnya juga sudah mulai didisain. Namun ada pemikiran lain, agar kegiatan ini dipersiapkan lebih matang, dan baru akan diluncurkan tahun depan.

Untuk mengisi slot penghargaan tersebut pada tahun ini, diupayakan ada sebuah penghargaan khusus yang diberikan tidak berdasarkan kualifikasi yang ditentukan oleh DGA.

### **1.12. Mengkoordinasikan semua Kegiatan Organisasi DGA.**

Kegiatan rutin dari Kesekjenan tentu saja mengelola dan mengkoordinasikan semua kegiatan organisasi. Sementara Wakil Sekjen bersama Wakil Ketua Umum mengelola kegiatan pelaksanaan Program Kerja di bidangnya masing-masing.

### **1.13. Penyelenggaraan Rapat-Rapat**

Salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan secara periodik adalah rapat-rapat. Banyak energi dihabiskan untuk keperluan tersebut, mulai dari perancangan agenda rapat, undangan, konfirmasi kehadiran, penyiapan prasaran rapat, memfasilitasi penyelenggaraannya sendiri, perumusan notulen, dan sebagainya.

Ada dua jenis rapat rutin di DGA, Rapat Dewan Pengurus Pusat (RDPP) dan Rapat Koordinasi (Rakor). Selama periode ini ada 14 RDPP yang diselenggarakan dan 35 Rakor.

#### **RAPAT DPP DGA (RDPP)**

Rapat Dewan Pengurus Pusat merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres, mengambil keputusan berkaitan dengan operasional organisasi dan pengaturan-pengaturan lain sejauh tidak bertentangan dengan keputusan Kongres dan Statuta DGA. Waktu penyelenggaraan Rapat DPP disesuaikan dengan kebutuhan operasional organisasi, atau setidaknya tidaknya dilaksanakan 3 bulan sekali.

Ini sesuai dengan ketentuan Statuta DGA Bab V Pasal 22 tentang Rapat Dewan Pengurus Pusat. Sampai dengan akhir tahun 2022, DGA menyelenggarakan 14 kali Rapat DPP, terdiri dari:

- 1) RDPP DGA-1: 2 Oktober 2021, dengan agenda utama pengenalan pengurus dan membahas masalah organisasi.
- 2) RDPP DGA-2: 16 Oktober 2021, antara lain menghasilkan keputusan: menyetujui konsep Statuta, Konsep GBKO, pembentukan Komite, dan rencana mengadakan webinar dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2022, dengan tema "Peningkatan Wawasan KelIndonesian pada Pemuda/I Aceh".
- 3) RDPP DGA-3: 6 November 2021, antara lain membahas terkait proses pengesahan badan hukum DGA, persiapan pembentukan *chapter*, pembentukan pengurus komite, pengadaan webinar, dan pembentukan panitia Kongres I DGA.
- 4) RDPP DGA-4: 12 November 2021, antara lain memutuskan: pembentukan *chapter* oleh Sekjen, audiensi dengan berbagai pihak, dan persiapan Kongres I DGA.
- 5) RDPP DGA-5: 27 November 2021, antara lain membahas pengurusan legalitas DGA di Kemenkumham, rencana mengundang Dr. Mahathir Muhammad/ Datuk Anwar Ibrahim

di Kongres I DGA, mengupayakan kehadiran Presiden Jokowi, pembentukan *Chapter* diharapkan selesai pada tanggal 15 Desember 2021, dan pemaparan program kerja para wakil ketua umum.

- 6) RDPP DGA-06: 11 Desember 2022, memutuskan: mengundang organisasi Aceh Serantau di daerah lain hadir dalam Kongres I DGA, tema Solidarity Forum: “17 Years of Aceh Tsunami: Global Solidarity for Humanity and Sustainable Development – An Aceh Model”, tema Kongres I DGA, “Menghimpun yang Terserak dan Menjemput yang Tertinggal untuk Aceh Bermartabat”, pengiriman surat ke Kedutaan Besar AS dan Turki, mengundang *Chapter* yang sudah terbentuk masing-masing diwakili dua orang, finalisasi program kerja tanggal 15 Desember 2021.
- 7) RDPP DGA-07: 18 Desember 2021, membahas terkait: persiapan Kongres, pembentukan *Chapter*, dan Finalisasi Program Kerja.
- 8) RDPP DGA-08: 14 Januari 2022, menghasilkan keputusan-keputusan: progres pengurusan Statuta DGA di Notaris, surat ucapan terima kasih kepada para pihak yang mendukung acara Kongres I DGA, tindak lanjut Kongres I DGA, pembahasan program kerja komite.
- 9) RDPP DGA-09: 26 Februari 2022, memutuskan: penyelenggaraan webinar tentang perjuangan perempuan Aceh, implementasi program komite DGA, rencana peringatan 17 Tahun Aceh Damai, penguatan ketauhidan oleh Prof. Erman.
- 10) RDPP DGA-10: 19 Maret 2022, memutuskan: rencana webinar yang semula dalam rangka hari Kartini diganti pada bulan wafatnya Laksamana Keumalahayati, program jangka pendek komite.
- 11) RDPP DGA-11: 4 Juni 2022, memutuskan: penyelenggaraan Webinar Komite SDM dan Perempuan, peringatan 17 Tahun Aceh Damai-MoU Helsinki akan diselenggarakan pada 15 Agustus 2022.
- 12) RDPP DGA-12: 2 Juli 2022, memutuskan: persiapan rencana detail kegiatan Aceh Damai pada 15 Agustus 2022.
- 13) RDPP DGA-13: 8 Oktober 2022, memutuskan: penerima anugerah DGA yang akan diserahkan pada Rapat Tahunan DGA pertama tanggal 24 Desember 2022, kegiatan peringatan Tsunami 26 Desember 2022 di Banda Aceh.
- 14) RDPP DGA-14: 10 Desember 2022, membahas progres report persiapan penyelenggaraan Rapat Tahunan I 2022.

### **RAPAT KOORDINASI (RAKOR)**

Rapat Koordinasi adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPP atau komponen dari DPP bersama kepengurusan Departemen, Team Task Force, Komite dan kelembagaan yang dibentuk oleh DPP, dan lain-lain. Waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan operasional organisasi.

Ini sesuai dengan ketentuan Statuta DGA Bab V Pasal 23 tentang Rapat Koordinasi. Sampai dengan akhir tahun 2022, DGA menyelenggarakan 35 kali Rakor, terdiri dari:

- 1) Rakor - 01: 27 Oktober 2022. Diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Kongres DGA.

Agenda: Koordinasi pelaksanaan kongres DGA dan Penggalangan solidaritas internasional dalam mendukung pembangunan Aceh pada peringatan Tsunami ke- 17, 26 Desember 2021

- 2) Rakor - 02: 16 November 2021. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Audiensi DPP DGA dengan Dr. Sofyan A. Djalil. Agenda: Memperkenalkan dewan pengurus pusat DGA, tujuan dan maksud pembentukan DGA, kegiatan webinar sebagai *quick wins activity* yang sudah dilakukan, dan rencana penyelenggaraan kegiatan Deklarasi DGA pada tanggal 26 Desember 2021.
- 3) Rakor - 03: 18 November 2021. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Audiensi DPP DGA dengan Pemprov DKI. Agenda: Memperkenalkan dewan pengurus pusat DGA, tujuan dan maksud pembentukan DGA. Audiensi ini juga terkait meminta kesediaan Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini, Bapak Anies Baswedan menjadi Dewan kehormatan.
- 4) Rakor - 04: 29 November 2021. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Audiensi DPP DGA dengan H.M Jusuf Kalla.
- 5) Rakor - 05: 08 Desember 2021. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan calon Sago Malaysia & Singapura. Agenda: silaturahmi, berbagi informasi, dan rencana pembentukan *Chapter* Malaysia dan Singapura.
- 6) Rakor - 06: 09 Desember 2021. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan calon Sago Maroko, Canada, dan Saudi. Agenda: Melakukan silaturahmi, berbagi informasi dan rencana pembentukan *Chapter*.
- 7) Rakor - 07: 16 Desember 2021. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan Calon Sago Swedia. Agenda: Merekatkan silaturahmi dan rencana pembentukan *Chapter*.
- 8) Rakor - 08: 17 Desember 2021. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan Calon Sago Jepang. Agenda: Merekatkan silaturahmi dan rencana pembentukan *Chapter*.
- 9) Rakor - 09:15 Januari 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Agenda: Pembahasan Program Kerja.
- 10) Rakor - 10: 04 Februari 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rencana Pembentukan Tim Advokasi Hukum dan Ekonomi. Agenda: Tindak Lanjut Kongres I DGA di Bidang Ekuin;
- 11) Rakor -11: 05 Maret 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Agenda: Tindak lanjut Proker Jangka Panjang KDSI.
- 12) Rakor - 12: 12 April 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Pembahasan Program Penguatan Akidah. Agenda: Pembahasan Program Penguatan akidah dan syariah
- 13) Rakor - 13: 20 Mei 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Pembahasan Program Penguatan Akidah (lanjutan)
- 14) 23 Mei 2022 Rakor - 14: Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan Ketua Sago Kanada. Agenda pertemuan: silaturrahi, berbagi informasi, masukan dan saran.

- 15) Rakor - 15: 23 Mei 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Agenda: Rencana Penyelenggaraan Webinar *Good Governance*.
- 16) Rakor - 16: 15 Juni 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Finalisasi Proposal Program Pelatihan *Character Building* dan *Vocational Training*. Agenda: Pembahasan Proposal Program *Greatness Aceh: Character Building* dan *Vocational Training*
- 17) Rakor - 17: 16 Juni 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Agenda: *Technical Meeting* KDKSI dan PUMA.
- 18) Rakor - 18: 22 Juni 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Agenda: Finalisasi kegiatan Webinar dengan Puma dan Perencanaan Kegiatan Aceh Damai
- 19) Rakor - 19: 23 Juni 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA - Dewan Kehormatan DGA (Sofyan A. Djalil dan Drs. Abdul Latif ). Agenda: *Brainstorming* lanjutan untuk meng-*elaborate* pemikiran-pemikiran/ konsep-konsep untuk kemajuan Aceh.
- 20) Rakor - 20: 01 Juli 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Agenda: Perencanaan Kegiatan Aceh Damai
- 21) Rakor - 21: 08 Juli 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Persiapan Kegiatan Aceh Damai (lanjutan)
- 22) Rakor - 22: 12 Juli 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan Sago USA. Agenda: Silaturahmi, berbagi informasi, masukan dan saran.
- 23) Rakor - 23: 13 Juli 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Pembahasan Kegiatan Aceh Damai (lanjutan)
- 24) Rakor - 24: 19 Juli 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Pembahasan Kegiatan Aceh Damai (lanjutan)
- 25) Rakor - 25: 26 Juli 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Pembahasan Kegiatan Aceh Damai (lanjutan)
- 26) Rakor - 26: 03 Agustus 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Pembahasan Kegiatan Aceh Damai (lanjutan)
- 27) Rakor - 27: 08 Agustus 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Audiensi DPP DGA dengan H.M Jusuf Kalla. Agenda: Mengundang H.M. Jusuf Kalla berkenan hadir untuk memberikan Sambutan Kunci berkenaan peran beliau dalam proses Perdamaian Aceh tersebut.
- 28) Rakor - 28: 13 Agustus 2022. Diselenggarakan oleh Komite Bidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Pembahasan Final Kegiatan Aceh Damai (lanjutan)
- 29) Rakor - 29: 26 Agustus 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan Calon Sago Filipina. Agenda: silaturahmi, berbagi informasi, masukan dan saran.
- 30) Rakor - 30: 20 Oktober 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan Sago Kawasan Afrika. Agenda: Agenda pertemuan adalah untuk silaturahmi, berbagi informasi, masukan dan saran.

- 31) Rakor- 31: 20 Oktober 2022. Diselenggarakan oleh Komite Energi, Lingkungan dan Sumberdaya Alam. Agenda: Pembahasan Seminar/ Webinar: Menjaga Leuser, Paru-Paru Dunia.
- 32) Rakor – 32: 28 Oktober 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan calon Sagoe Inggris. Agenda: Melakukan silaturahmi, berbagi informasi dan rencana pembentukan *Chapter*.
- 33) Rakor – 33: 29 Oktober 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Agenda: Persiapan Penyelenggaraan Annual Meeting DGA
- 34) Rakor – 34: 12 November 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Rapat DPP DGA dengan calon Sagoe Inggris (Lanjutan)
- 35) Rakor – 35: 19 November 2022. Diselenggarakan oleh Kesekjenan. Agenda: Persiapan Penyelenggaraan *Annual Meeting* DGA (Lanjutan)

#### 1.14. Penerbitan Surat Keputusan Organisasi

Selama 2021-2022 DGA menerbitkan 21 Surat Keputusan (SK), terdiri dari:

Nomer SK	Tanggal	Tentang
No: 101/SK-DGA/1221	08 November 2021	Pembentukan Panitia Penyelenggara Kongres I Diaspora Global Aceh
No: 102/SK-DGA/1221	10 Desember 2021	Pembentukan Komite-Komite dan Penetapan Kepengurusan Komite
No: 103/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Qatardan Pengesahan Kepengurusannya.
No: 104/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Libyadan Pengesahan Kepengurusannya.
No: 105/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Amerika Serikat dan Pengesahan Kepengurusannya.
No: 106/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Sudan dan Pengesahan Kepengurusannya.
No: 107/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Brunei Darussalam dan Pengesahan Kepengurusannya.
No: 108/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Jerman dan Pengesahan Kepengurusannya
No: 109/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Australia dan Pengesahan Kepengurusannya
No: 110/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Kanadadan Pengesahan Kepengurusannya
No: 111/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Saudi Arabia dan Pengesahan Kepengurusannya
No: 112/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Malaysia/ Singapura dan Pengesahan Kepengurusannya
No: 113/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Yordania dan Pengesahan Kepengurusannya
No: 114/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Turki dan Pengesahan Kepengurusannya
No: 115/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Yamandan Pengesahan Kepengurusannya
No: 116/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Scandinavia dan Pengesahan Kepengurusannya

No: 117/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Jepang dan Pengesahan Kepengurusannya
No: 118/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Tunisiadan Pengesahan Kepengurusannya
No: 119/SK-DGA/1221	18 Desember 2021	Pembentukan Diaspora Global Aceh Chapter Republik Arab Mesir dan Pengesahan Kepengurusannya
No: 120/SK-DGA/1221	04 Juni 2022	Pengangkatan Wakil Sekretaris Jenderal Diaspora Global Aceh Antar Waktu
No: 121/SK-DGA/1221	25 Maret 2022	Pembentukan Panitia Penyelenggara Webinar "Revisiting Pahlawan Perempuan Aceh dalam Kepemimpinan Perempuan".

### 1.15. Penyelenggaraan Rapat Tahunan

Sesuai ketentuan Statuta, Rapat Tahunan diselenggarakan sekali dalam setahun, dengan jadwal pelaksanaannya ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat. Rapat Tahunan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan membahas permasalahan organisasi lainnya.

Rapat Tahunan DPP DGA 2022 insya Allah diselenggarakan pada 24 Desember 2022.

Pada akhirnya, bahwa ada sejumlah kegiatan substansial yang seharusnya termasuk dalam rencana kerja *crash program*, namun karena berbagai kondisi dan kendala yang dihadapi, kegiatan-kegiatan berikut ini belum bisa ditangani pada tahun pertama:

- a. Pembuatan *website* yang merupakan pusat kegiatan berkomunikasi dan mempromosikan platform DGA secara ekstensif;
- b. Membuat *data-base* keanggotaan DGA, terutama berupa '*talent pool*', mengidentifikasi para *think-tanker* diaspora Aceh yang memiliki kualifikasi tinggi di bidangnya masing-masing. "DGA perlu ada kalau mereka ada";
- c. Membangun dan mengefektifkan berfungsinya media sosial, seperti Instagram, Twitter, Telegram, dan sebagainya; sebagai ujung tombak sosialisasi program;
- d. Mempersiapkan program *Funding Strategy*, karena sangat sulit bagi DGA dapat menjalankan fungsinya kalau tidak didukung oleh mekanisme pendanaan secara *proper*;
- e. Memformulasikan dan mengimplementasikan *Branding Strategy* secara konseptual. Karena DGA harus mempromosikan diri kepada para *stakeholders* dari berbagai kalangan, terutama meyakinkan para diaspora Aceh yang tersebar di mana-mana dari berbagai tingkatan latar belakang sosialnya.
- f. Merumuskan kembali Konsep Organisasi DGA, dengan struktur dan value yang benar-benar dapat memberikan manfaat optimal kepada Aceh dan para diaspora Aceh dari seluruh dunia.

Demikianlah, selama 22 Agustus 2021 - 31 Desember 2022 proses persiapan, perancangan, pembentukan dan pengaturan fondasi bangunan Sistem-Organisasi-Baru DGA selesai dikerjakan. Setidaknya, uji-coba putaran pertama (1<sup>st</sup> lap) melingkari 'bangunan' Sistem Organisasi ini telah tuntas dijalani. Berupaya optimal memenuhi komitmen. *Mission accomplished*.

## 2. PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLEH BIDANG-BIDANG

### 2.1. *Global Aceh Solidarity Forum*

Dengan mengambil momentum peringatan 17 tahun Tsunami Aceh, pada tanggal 26 Desember 2021, DGA menyelenggarakan *Global Aceh Solidarity Forum*, dengan mengambil tema: Solidaritas Global Bagi Kemanusiaan dan Pembangunan Berkelanjutan – Suatu Model dari Aceh”. Dalam kesempatan tersebut DGA juga menyelenggarakan Kongres I DGA, dalam rangka pengesahan perangkat organisasi DGA sesuai dengan Statuta. Dua kegiatan tersebut merupakan event besar pertama yang digelar DGA, setelah sebelumnya pada tanggal 10 November 2021 diselenggarakan Webinar: Peningkatan Wawasan Global dan ke-Indonesiaan Pada Masyarakat Aceh, sebagai langkah awal memperkenalkan DGA sekaligus *pre-event Kongres I DGA*.

Beberapa tamu kehormatan baik di tingkat nasional maupun internasional hadir dalam acara ini. Yang fenomenal tentu saja kehadiran Presiden Republik Turki Mr. Recep Tayyip Erdogan secara *virtual*, memberikan *Keynote Speech*. Ada H.M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BRR Aceh dan Nias tahun 2005-2009, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Sofyan A. Djalil, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, beberapa perwakilan dari Kedutaan Besar Australia, Jerman Jepang, Singapura, dan Venezuela, Perwakilan PBB, Perwakilan Bank Dunia, Perwakilan ADB, Pimpinan Media Grup Surya Paloh dan Pimpinan CT Corporation, Chairul Tanjung. Sesuai daftar hadir, acara *Global Aceh Solidarity Forum* yang diselenggarakan secara *hybrid* dihadiri oleh 218 orang peserta daring dan 57 orang peserta luring.

Latar belakang penyelenggaraan acara ini, menurut Ketua Umum DGA Mustafa Abubakar, utamanya untuk mengambil hikmah, pembelajaran yang sangat luas, agar generasi mendatang lebih siap dan cerdas dalam mengantisipasi dan memitigasi bencana alam yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam bahasa Aceh ada ungkapan yang berarti “banyaknya kita berjalan dan bergaul dan banyak pula kita melihat, panjang diberi kesempatan hidup banyak peristiwa yang kita alami banyak juga hikmah yang kita dapatkan”. Tsunami merupakan salah satu dari pembelajaran atau peristiwa yang telah kita lalui. Kristalisasi peristiwa tsunami menggambarkan perwujudan dari ungkapan tersebut. Semoga ke depan kita akan lebih baik, Aceh semakin maju, dalam ke-Indonesiaan dan semakin berperan dalam pergaulan antar bangsa

Presiden Republik Turki Mr. Recep Tayyip Erdogan, dalam sambutan kuncinya, menyatakan Turki dan Indonesia memiliki ikatan persahabatan yang kuat sejak beberapa abad lalu. Hal itu terjadi di era Sultan Aceh Alaudin, Ketika kerajaan Turki memberikan bantuan kepada Sultan Alaudin. Kehadirannya untuk melanjutkan solidaritasnya dengan saudara-saudara di Indonesia. Karena seperti dinyatakan dalam Hadis: “Sesama Muslim adalah Bersaudara”. Erdogan adalah tokoh internasional yang menyaksikan langsung dampak dari kedahsyatan bencana tsunami, ketika berkunjung ke Banda Aceh setelah terjadinya bencana tsunami tahun 2004. Turki waktu itu memberikan bantuan kepada Indonesia lebih dari 75 juta dolar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Sofyan A. Djalil, menilai ada pelajaran bagus dari bencana tsunami Aceh, karena pembangunan kembali akibat bencana di Aceh setelah tsunami bisa menjadi pembelajaran (*lesson learned*) untuk tingkat internasional. Menurutnya, Indonesia merupakan satu- satunya negara di mana bantuan internasional hampir 100%

dapat di *reimburse*, tidak ada kasus seperti di negara lain. Bantuan yang diberikan oleh berbagai negara sekitar USD 7 miliar, hampir seluruhnya bisa di-*reimburse*. Pengalaman negara lain ada hanya 20% -30% tapi Indonesia di atas 90%. Kuncinya adalah *good governance* dan *good management*.

H.M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 mengungkapkan ada 2 langkah yang dilakukan. Pertama, tanggap darurat dan kedua, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam tanggap darurat meliputi: mempersiapkan tempat tinggal sementara (*Shelter*), menyediakan makanan dan menyiapkan layanan Kesehatan bagi korban. Untuk keperluan rehab dan rekon diperoleh dari UN *Summit*, dalam waktu yang tidak lama terkumpul persetujuan semua negara sebesar 7 miliar USD atau kurang lebih Rp 1.000 triliun. "Itulah hal-hal yang tentu bagi saya suatu ingatan yang tidak akan lepas. Kemudian kita lakukan rehab-rekon dalam waktu 6 bulan," ungkap Jusuf Kalla.

Dengan dasar pemikiran tidak mungkin ada rehab dan rekon apabila keamanan tidak kita selesaikan, maka upaya-upaya perundingan dengan GAM kembali dilakukan, di Finlandia dan dalam waktu 6 bulan semua selesai. Persis 6 bulan selesai tanggap darurat, mulai rehab dan juga dalam waktu 6 bulan perdamaian selesai. "Dengan demikian recon dapat dilakukan dalam situasi damai dan juga secara bersamaan dana dari luar itu mulai masuk, sehingga semua dapat dilaksanakan dengan baik," kenang Jusuf Kalla.

Nova Iriansyah, Gubernur Aceh memandang solidaritas merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan kembali Aceh pasca bencana. Dengan solidaritas, berbagai jenis bantuan bantuan menjadi terhimpun dan disumbangkan oleh puluhan negara di seluruh dunia. Pada saat itu

pemerintah pusat membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Sumatera Utara atau BRR NAD-Nias. Badan inilah yang kemudian menangani ratusan bentuk program atau proyek pemulihan, baik itu fisik maupun psikologis serta sektor sosial-ekonomi lainnya. Koordinasi seluruh bantuan kemanusiaan internasional berada di bawah tanggung jawab BRR NAD-Nias. Badan-badan yang merupakan organ PBB seperti UNDP, WHO, UNICEF, ILO dan lainnya memiliki peran yang sangat penting, demikian juga lembaga-lembaga *non-governmental* dari berbagai negara melakukan sinergi yang cukup baik dengan BRR NAD-Nias dan dengan mitra lokal.

"Apa yang sudah kita saksikan di Aceh hendaknya memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa bergandengan tangan menjadi satu kewajiban moral untuk membantu para korban bencana. Dalam kondisi tersebut kita harus memiliki satu bahasa yang sama yaitu bahasa kemanusiaan. Saya berharap Global Aceh *Solidarity Forum* hendaknya menjadi suatu forum yang terus mengkampanyekan pentingnya solidaritas dalam membangun kawasan yang tertimpa bencana," ujar Nova.

Berbagai paradoks terjadi dalam bencana tsunami di Aceh, seperti diungkapkan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BRR Aceh dan Nias tahun 2005-2009. Paradoks utama adalah cerai-berai yang menyatukan. Menceraiberaikan tapi menyatukan. Tsunami telah menceraiberaikan kita semua, sanak keluarga, harta benda, bahkan mimpi itu pun tercerai berai. Tapi tsunami juga memberikan keping paradoks satunya lagi yaitu menyatukan. Ribuan relawan beserta bantuan-bantuan yang mereka bawa berduyun-duyun datang dari segala penjuru daerah di Indonesia bahkan belahan dunia. Mereka membuka lebar-lebar pintu bahkan

jendela-jendela persahabatan melalui uluran kehangatan dan kemanusiaan. Bahkan, bantuan dalam elemen militer pun datang ke Aceh.

“Belum pernah ada konsentrasi militer yang begitu besar setelah perang dunia ke-2 selain di Aceh. Password-nya cuma satu, kemanusiaan. Dunia seperti dipersatukan di Aceh. Dalam paradoks itu, Aceh boleh dibilang beruntung sekali. Betapa tidak, tsunami sekejap menjadi katalis bagi proses rekonsiliasi-reintegrasi. Kita sadar, jalan menuju kesepakatan Helsinki 15 Agustus 2005 di bawah pimpinan bapak wakil Presiden Jusuf Kalla itu panjang sekali. Tsunami mempercepatnya, di meja perundingan Helsinki mencairkan suasana batin dan kecanggungan pada diri para perunding kedua belah pihak. Itu bukanlah perkara mudah,” tutur Kuntoro.

MoU Helsinki mensyaratkan kedua belah pihak yang bertikai, GAM dan pemerintah RI bersepakat untuk menutup buku konflik berdarah 3 dasawarsa. Pendekatannya damai, holistik, berkesinambungan dan bermartabat bagi semua. Tsunami meminta kita menyelenggarakan pekerjaan membangun kembali rehab-rekon, bahkan membangun yang lebih baik ketimbang sebelumnya, *build back better*. “Istilah ini lahir di Aceh saat Bill Clinton datang ke Aceh menengok kita semuanya dan istilah ini sampai sekarang masih digunakan, bahkan dalam pertemuan besar di Glasgow dua bulan yang lalu. *Build Back Better* adalah sesuatu yang dijadikan referensi,” ujarnya.

Juru bicara Parlemen Republik Singapura, Mr. Tan Chuan-Jin, menceritakan keterlibatannya secara langsung sebagai komandan kelompok pendukung kemanusiaan di Meulaboh, salah satu kota pesisir yang paling parah terkena dampaknya. Ia menyaksikan secara langsung kehancuran yang luar biasa. Kehilangan nyawa yang tragis, kesedihan mendalam, dengan banyaknya korban jiwa. Meulaboh yang dulu ramai menjadi kota yang tertutup air dan semuanya hancur. Meskipun begitu ia melihat secara langsung upaya pihak pemerintah Indonesia, khususnya TNI dalam mengkoordinasikan operasi bantuan secara efektif. “Kekuatan dan tekad rakyat Aceh serta kepercayaan dan persahabatan yang terjalin antara rakyat Singapura dan Indonesia. Tekad untuk membangun kembali dan bangkit kembali dengan kuat serta menghadapi kesulitan dengan keberanian yang mendalam adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan,” ujarnya.

Peran Pemerintah Jepang dalam membantu penanganan bencana gempa dan tsunami di Aceh, disampaikan oleh Duta Besar Jepang, Kanasugi Kenji. Pemerintah Jepang memberikan bantuan dalam tiga aspek, yaitu: pendanaan, keahlian, dan sumberdaya manusia. Disamping mengirim tim penyelamat darurat internasional, Jepang juga memberi bantuan seperti bantuan logistik darurat dan bantuan dana hibah darurat untuk mendukung rekonstruksi. Sebagai contoh, melalui dana hibah untuk mempercepat rekonstruksi, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan menara yang dipakai sebagai tempat pengungsian dari tsunami. Pada bagian lain ia juga mengharapkan Diaspora Global Aceh menjadi jembatan yang menghubungkan orang di seluruh dunia yang memiliki berbagai latar belakang dan mempunyai hubungan dengan Aceh serta bisa berkontribusi untuk kemajuan Aceh di masa mendatang.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia & Brunei Darussalam, Mr. Vincent Picket, ketika berkunjung ke Aceh tahun 2020, melihat dengan mata kepalanya sendiri dedikasi dan keteguhan rakyat Aceh dalam mengelola dan bantuan untuk melakukan transformasi kota Banda Aceh menjadi kota yang dinamis dan penuh harapan di masa depan. Anggota

Masyarakat Uni Eropa, terutama Belanda, Swedia, Denmark, Jerman, Finlandia, Belgia, dan Irlandia, merupakan kontributor donor terbesar dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Pemerintah Venezuela juga memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap penanganan bencana tsunami di Aceh. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Venezuela di Indonesia, Mr. Radame Jesus Gomez Azuaje. Saat itu, Presiden Venezuela Hugo Chavez, memutuskan untuk memberikan bantuan berupa generator listrik terapung, di beberapa lokasi yang terdampak. Pemerintah Venezuela juga memberikan bantuan dalam pembangunan Politeknik di Banda Aceh.

Perwakilan Negara Persemakmuran Australia, Mr. James Gilling, menyampaikan peran pemerintah Australia dalam penanganan bencana tsunami di Aceh, dengan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar \$250 juta. Australia menyediakan bantuan keahlian teknis dalam pemetaan tanah untuk rekonstruksi dan pembangunan di Aceh. Pemerintah Australia terus melakukan kerjasama dalam manajemen risiko bencana, termasuk dalam penanganan Covid-19 berupa program "Siap Siaga".

Ms Valerie Julliard, Perwakilan PBB, menjelaskan tentang peran lembaga-lembaga di bawah PBB dalam penanganan bencana di Aceh, *The UN Office for The Coordination for Humanitarian Affairs (OCHA)*, *The UN Disaster Assessment and Coordination Team (UNDACT)* adalah diantara lembaga internasional yang memberikan respon paling awal hadir di Aceh pasca bencana tsunami. Dari mulai mendirikan tenda darurat, membersihkan puing-puing, dan bantuan 660.000 vaksin, 14 ton pasokan peralatan kesehatan dan 8.500 ton bahan makanan, pada bulan pertama pasca bencana tsunami. Sungguh kemampuan Indonesia dalam merespon bencana telah mengalami perkembangan yang signifikan pasca terjadinya bencana tsunami di Aceh, misalnya dengan dibentuknya BASARNAS (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, serta 15 negara mitra bekerjasama dengan sangat erat melalui *Multi Donor Fund (MDF)* untuk Aceh dan Nias, menggelontorkan dana bantuan sebesar

\$655 juta, atau sekitar 10 % dari total biaya untuk rekonstruksi di Aceh. Hal itu disampaikan oleh Perwakilan Bank Dunia, Ms. Alessandra Campanaro. Dalam kurun waktu tahun 2007 dan 2008, tercatat bencana alam nasional tersebut telah menyebabkan kerugian sekitar \$2,2 - \$ 3 miliar atau setara dengan 0,2-0,3 GDP Indonesia. Pengalaman kolektif yang bisa dipelajari dari tsunami di Aceh adalah bahwa kesiapan merupakan kunci. Hal ini memerlukan dukungan organisasi berbasis masyarakat seperti Diaspora Global Aceh, untuk mendukung Pemerintah Indonesia memperkuat kesiapan dan ketahanan dalam menghadapi fenomena alam ini di masa depan.

Asian Development Bank (ADB) juga ikut berperan dalam rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Direktur ADB untuk Indonesia, Mr. Jiro Tominaga, ADB telah memberikan bantuan secara cepat sebesar \$290 juta. Melalui bantuan ini ADB berhasil menyelamatkan 23.400 hektar tanah pertanian, rehabilitasi 3.000 kolam ikan, membangun 6.000 rumah baru dan rehabilitasi 1.400 rumah yang rusak, memperbaiki 75 Km jalan, serta mendorong bangkitnya 6.000 pengusaha mikro. "Tujuan kami adalah untuk membangun infrastruktur bukan hanya

dengan kualitas lebih baik, namun bisa memenuhi kebutuhan rakyat Aceh. Belajar dari bencana tsunami di Aceh, salah satu prioritas ADB adalah memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim,” jelasnya.

## **2.2 Peringatan 17 Tahun Aceh Damai dengan tema: “Aceh Damai Dalam Bingkai Keindonesiaan”**

MoU Helsinki merupakan tonggak sejarah penting dalam menciptakan kedamaian di Aceh. Untuk itu maka DPP DGA menyelenggarakan peringatan 17 Tahun Aceh Damai pada tanggal 15 Agustus 2022, bertempat di Ruang Konstitusi, Gedung Trigatra Lembaga Ketahanan Nasional, secara hybrid. Jumlah peserta daring dan luring sekitar 100 orang. Peringatan 17 tahun perdamaian Aceh dibuka langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa masyarakat Aceh diharapkan bisa memaknai dari perwujudan perdamaian Aceh, tidak hanya sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan yang terjadi pada masa lampau, namun juga untuk membangun Aceh damai dalam bingkai keIndonesiaan.

Dalam Diskusi Panel yang dipandu oleh Fachry Aly dan Suraiya Kamaruzzaman, menghadirkan beberapa Narasumber, yaitu: Hamid Awaludin, Sofyan A. Djalil, Hassan Wirajuda, H. M Jusuf Kalla, Mustafa Abubakar, dan Nova Iriansyah.

Hamid Awaludin salah satu tokoh penting dalam perundingan RI dan GAM, menceritakan bagaimana proses terwujudnya MoU Helsinki. Sebagai Menteri Hukum dan HAM ia ditugaskan langsung oleh JK untuk melakukan perundingan perdamaian Aceh pada tahun 2005 di Helsinki. Menurutnya, proses menuju MoU Helsinki bukan sebuah perundingan yang mudah, sebuah proses perdamaian yang berlangsung lama. Perlu lima kali putaran untuk mencapai nota kesepakatan damai yang menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut.

Seperti dipesankan oleh Bapak Jusuf Kalla, didalam perundingan tersebut harus dalam posisi sejajar; yang ditawarkan kepada GAM pada saat itu ada dua yaitu; satu, jangan menuntut merdeka dan yang kedua letakkan senjatamu. Putaran pertama paling sulit, karena penuh cacik maki yang diterima pihak perunding. Hal itu berlangsung 5 hari. Pada putaran kedua ada kendala bahasa dari pihak perunding dan perwakilan GAM, namun akhirnya disepakati menggunakan bahasa melayu. Putaran ketiga pihak GAM meminta atau lebih tepatnya memaksakan membawa 7 orang perunding yang tercatat di penjara Sukamiskin ke Helsinki, Usman Lampoh Awe, Amni, dan Kamaruzzaman. “Sehingga pada saat itu ketujuh orang ini dibuatkan paspor untuk diberangkatkan ke swedia. Dan banyak trik-trik yang digunakan pada saat itu mencapai kesepakatan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005”, tutur Hamid.

Menurut Hamid, dua minggu setelah perdamaian semuanya tidak boleh lagi menggunakan atribut atau simbol-simbol yang pernah digunakan oleh GAM, karena memicu terjadinya konflik. Kenapa pelarangan bendera tidak tertuang didalam kesepakatan MoU Helsinki, karena dianggap aspek kultural yang bersifat sejarah. “Semua yang bersifat sejarah dan simbol pergerakan yang mengakibatkan konflik kita akhiri dan tidak perlu lagi dibunyikan dalam kalimat tertulis,” jelasnya.

Hassan Wirajuda pada saat itu adalah Menteri luar negeri, juga ikut menyaksikan perundingan antara RI dan GAM yang menghasilkan perdamaian MoU di Helsinki pada 15

Agustus 2005. Inisiatif pertama perdamaian sebenarnya sudah muncul pada pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid mendekati pihak GAM. Beliau mengirim pak Bondan untuk menemui panglima GAM Tgk Abdullah Syafi'i. Proses 6 tahun perundingan aceh ini sangat tergantung pada dinamika proses reportasi kedalam keterbukaan. "Contoh tahun 2000 kita sudah sepakat untuk keterbukaan, tapi indonesia tahun 2000 masih tabu. Undang-undang otonomi khusus Aceh itu bukan hasil perundingan dengan kami, tapi itu kebijakan pemerintah. Sejajurnya bukan hanya negara-negara Eropa juga melibatkan Amerika, Jepang. Untungnya negosiasi kita sudah selesai, pihak GAM meminta adanya partai Lokal ditulis secara eksplisit didalam perjanjian MoU Helsinki. Maka pemerintah menolak, kalau tidak mau dengan rumusan yang diusulkan maka tidak ada perdamaian," jelas Hasan.

Peran H. M Jusuf Kalla dalam perundingan RI dan GAM tidak perlu diragukan lagi. Kegigihannya untuk menyelesaikan konflik antara RI dan GAM akhirnya berhasil. Menurutnya, Tsunami juga yang menjadi pemicu percepatan perdamaian Aceh. Perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2005 di Helsinki yang menghasilkan MoU. Kuncinya, dalam berunding kita harus tahu dengan siapa kita berunding. Hal itu diterapkan dalam penanganan kasus Poso, dan lain-lain.

Sebagai Penjabat Gubernur Aceh (2005-2006), Mustafa Abubakar terlibat secara langsung dalam beberapa kegiatan penting pada masa transisi pasca tsunami dan setelah perdamaian Aceh di Helsinki. Bekerjasama dengan BRR ia terlibat langsung dalam proses membangun kembali Aceh bekerjasama dengan BRR. Ada beberapa capaian penting yang dilakukan dalam periode satu tahun jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Aceh, antara lain: 1) Melahirkan Undang-Undang Baru tentang pemerintah Aceh No 11 tahun 2006; 2) Melaksanakan pilkada akbar serentak seluruh Provinsi Aceh; 3) Membangun kembali kepercayaan Rakyat Aceh; 4) Mempersatukan semua komponen dan elemen yang ada di Aceh dengan Membangun pemerintah Aceh yang bersih dan bebas korupsi; 6) Upaya-upaya menyejahterakan pihak-pihak yang selama ini berontak; 7) Melakukan Tahap-tahap reskontruksi pasca tsunami dibantu oleh NGO luar negeri yang bantuannya mencapai 6-7 miliar USD.

Menurut Mustafa, hikmah dibalik terjadinya tsunami adalah ada 3. Pertama, betapa perkasanya Allah. Kedua, timbulnya solidaritas global terhadap aceh. Ketiga, hadirnya perdamaian Aceh.

Sementara itu, Nova Iriansyah, Gubernur Aceh dari 5 November 2020 sampai 5 Juli 2022, dan sebelumnya juga pernah menjadi Plt Gubernur Aceh, ikut memberikan kontribusi pasca perjanjian Helsinki. "Perdamaian Aceh sukses, sehingga generasi Muda harus tahu tentang perdamaian Aceh," ujarnya.

### **2.3. *Revisiting* Pahlawan Perempuan Aceh dalam Kepemimpinan Perempuan**

Perempuan Aceh telah terbukti menunjukkan peran besar dalam sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini diakui dan terbukti dari 3 figur perempuan Aceh, Tjut Nyak Dhien (1848 – 1908), Cut Nyak Meutia (1870 – 1910), dan yang terakhir Laksamana Kemalaisyati (1550 – 1615) dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah RI. Ketiga pahlawan nasional perempuan Aceh tersebut gigih berjuang di medan laga menentang penjajahan. Mereka selalu menjunjung harkat dan martabat bangsa. Khusus Laksamana Keumalaisyati,

lebih banyak berlaga di tengah laut. Laksamana Keumalahayati tidak hanya dikagumi keahliannya dalam memimpin pasukan, ia juga pandai berdiplomasi. Kepiawaiannya bertempur dibuktikannya dengan secara mandiri menumbangkan Kapten Cornelis de Houtman yang keberhasilannya ini telah mempermalukan pemerintah Belanda pada masa tersebut.

Nilai-nilai historis kepahlawanan dan kepemimpinan perempuan Aceh patut menjadi tauladan bagi kita. Pemahaman dan pengejawantahan pemikiran dan nilai-nilai para pahlawan Aceh, diantaranya keimanan, kecintaan pada tanah air, keteguhan dalam prinsip, kepemimpinan, tidak pantang menyerah, semangat menjalankan tugas, kelihaihan dalam berstrategi, dan kemampuan bernegosiasi patut kita telusuri dari kesejarahan mereka dan menginspirasi kita dalam berkarya.

Kegiatan Webinar diselenggarakan pada Sabtu, 18 Juni 2022, dengan tema: “*Revisiting Pahlawan Perempuan Aceh dalam Kepemimpinan Perempuan*”, antara lain mengemuka beberapa isu penting terkait peran Wanita Aceh. Webinar diselenggarakan oleh Komite SDM dan Peran Perempuan Diaspora Global Aceh sebagai salah satu usaha untuk mengenal lebih jauh pemikiran para tokoh perempuan, khususnya pahlawan perempuan Aceh dan diharapkan dapat memperkaya *repertoire* nilai-nilai baik dan daya juang kita dalam berkarya. Dipilihnya bulan Juni adalah untuk mengenang bulan berpulanginya Laksamana Keumalahayati. Dalam usaha ini, Pembicara yang ditampilkan adalah tokoh perempuan dalam pemerintah Indonesia, tokoh perempuan tangguh dan juga tokoh pencinta sejarah dari Aceh, serta tokoh pemimpin perempuan dunia.

Dalam pengantarnya, Ketua Umum DPP DGA Mustafa Abubakar menjelaskan tentang organisasi DGA. Webinar ini merupakan upaya untuk mengejawantahkan semangat pendirian DGA untuk meneladani nilai-nilai kepahlawanan perempuan Aceh. Itulah mengapa acara ini diselenggarakan pada bulan Juni, karena mengambil momentum wafatnya pejuang Wanita Aceh yang terkenal, Kemalayahati, 1615. Tiga tokoh pahlawan perempuan Aceh: Tjut Nyak Dien, Tjut Nyak Meutia, dan Laksamana Kemalayahati sudah dianugerahi pahlawan nasional. Prestasi kaum perempuan Aceh bukan hanya menyangkut ketiga pahlawan perempuan tersebut, tetapi juga sejarah menunjukkan ada 4 perempuan Aceh yang memimpin kesultanan Aceh Darussalam, termasuk melakukan perubahan undang-undang.

Bagaimana kondisi perempuan di Indonesia, digambarkan oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara konstitusi, persamaan hak perempuan dan laki-laki dijamin oleh UUD 1945. Namun dalam faktanya, masih ada kesenjangan dalam peran serta perempuan di berbagai bidang. Jumlah perempuan Indonesia 49,42 % dari jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 270 juta. Namun dalam partisipasi pekerjaan, baru 54,03 %, sedangkan laki-laki 82,14. Keterwakilan perempuan dalam politik baru mencapai 21 %, masih di bawah kuota yang disediakan sebesar 30%.

Nora Idah Nita, Anggota Komisi V DPR Aceh, menilai peran perempuan di Aceh di bidang legislatif cukup signifikan. Di Aceh Tamiang, kuota perempuan lebih dari 30 %, dimana dari 30 kursi DPR diduduki oleh 11 anggota DPR perempuan. Beberapa program di SKPD juga mulai mengarusutamakan kepentingan gender, seperti untuk pelatihan dan sebagainya.

Prestasi Wanita Aceh lain yang cukup menonjol adalah bisa menjadi Ketua Mahkamah

Syariah. Hal ini dicapai oleh Dra. Hj. Rosmawardani, SH, MH., Ketua Mahkamah Syariah Aceh, 2020-2021. Ia sudah berkiprah selama 42 tahun di berbagai institusi yang terkait dengan pengadilan. Ia mengakui, masih sangat minim peran serta perempuan di dunia pengadilan, karena umumnya tidak mau mendaftar. Dari 117 hakim, hakim perempuan hanya 27 orang. Lingkungan keluarganya sangat mendukung mengapa dia bisa berprestasi tinggi di dunia pengadilan. Orang tuanya tidak membedakan Pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Kendala dalam pengembangan perempuan lebih disebabkan faktor historis dibanding masalah teknis.

Kondisi kesetaraan perempuan di Indonesia dibanding negara lain masih memprihatinkan. Demikian dikemukakan oleh Suraiya Kamaruzzaman, aktivis hak perempuan dan pendiri LSM Pemberdayaan dan Penguatan Perempuan Flower Aceh, Pusham Universitas Syiah Kuala. Data Lembaga internasional menunjukkan, Indonesia masih berada di peringkat 101 dalam kesetaraan gender, turun 16 peringkat dibanding tahun 2021. Dalam penggajian, misalnya, perempuan dibayar 68 % dari gaji laki-laki. Kasus kekerasan berbasis gender juga meningkat di Indonesia. Namun demikian, optimisme masih ada, karena Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang dipersiapkan menjadi “Planet 50:50 *Gender Equity*”

Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI, mengaku memiliki ketertarikan yang luar biasa dengan Aceh. Pada tahun 2004, ia terlibat dalam penanganan bencana tsunami di Aceh. Ia mengaku ingin belajar banyak tentang Aceh. Ia sedang mempersiapkan suatu pentas teater musik yang menggambarkan kepahlawanan Laksamana Malahayati. Menurutnya, perempuan diberikan tempat yang baik dalam sistem kekerabatan Aceh.

Ia mengakui, diskriminasi perempuan merupakan fakta di seluruh dunia. Namun perempuan juga masih menghadapi permasalahan terkait adat dan lingkungan. Untuk itu, bagi perempuan yang ingin berkiprah harus siap menjadi tidak sempurna. Hal itu merupakan pilihan.

Dalam testimoninya, bintang film senior Christine Hakim mengaku sangat berkesan ketika memerankan sebagai tokoh Tjut Nyak Dien dalam film. Christine Hakim merasa lebih memahami tentang Aceh setelah memerankan tokoh Tjut Nyak Dien. Ia yang mengaku berdarah Aceh dari kakeknya, mengharapkan Aceh bisa bangkit melalui peran perempuan Aceh.

#### **2.4. Peningkatan Wawasan Global dan KelIndonesiaan.**

Webinar dengan tema:” Peningkatan Wawasan Global dan KelIndonesiaan Kepada Masyarakat Aceh”, diselenggarakan pada tanggal 10 November 2021, dengan *media zoom*. Peserta webinar dari Indonesia dan luar negeri, yaitu dari Qatar, Kuwait dan Amerika. Webinar mengetengahkan narasumber para tokoh Aceh yang telah dikenal di masyarakat dalam bidang keahliannya masing- masing, yaitu Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris 2016 – 2020, Dr. Rizal Sukma, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. T. Abdullah Sanny, Deputy Country Director ADB Indonesia & President Indonesian Diaspora Network Global 2019 – 2021, Said Zaidansyah, dan pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, T. Rezasyah, MA, Ph.D, dipandu oleh Dekan Fakultas Psikologi UI, Dr. Tjut Rifameutia Umar Ali, MA sebagai moderator.

Kegiatan Webinar ini, menurut Ketua Umum Diaspora Global Aceh (DGA) Mustafa Abubakar,

merupakan bagian dari usaha merajut jalinan kebersamaan antar diaspora Aceh di seluruh dunia, memperkaya narasi-narasi keAcehan dalam bingkai keIndonesiaan, disamping juga untuk memperluas wawasan. Diaspora Aceh Global dibentuk sebagai *think tank* untuk mengembangkan dan mempromosikan nilai-nilai keAcehan dan keIndonesiaan pada tataran strategis untuk menjalin persaudaraan, perdamaian, kemanusiaan, sosial dan kebudayaan, demokrasi, inovasi dan adaptasi, kemajuan serta kemakmuran.

Kualitas sumber daya manusia Aceh, menurutnya, agar terus ditingkatkan melalui *pool of talents* dan *pool of opportunities* merupakan suatu keharusan. Banyak pahlawan dan syuhada di Aceh yang telah mengorbankan harta, benda dan nyawa dalam berperang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. “Oleh karena itu, sudah pada tempatnya kita tetap perlu mengingat jasa- jasa para pahlawan dan syuhada bangsa yang membuat kita dapat merasakan sebagai bangsa yang merdeka. Diharapkan Diaspora Global Aceh tetap relevan di segala zaman,” ujarnya.

Dalam Sambutan Kucinya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, berharap agar diaspora menjadi pemantik bagi generasi muda Aceh di masa sekarang sehingga bisa tampil menjadi sumber daya yang kompetitif di tingkat nasional dan global. Juga mengapresiasi terbitnya buku “Diaspora Aceh Melintas Jagat”, yang diprakarsai oleh Yayasan Taman Iskandar Muda (TIM), sebagai sumber belajar bagi siapapun yang ingin memaknai perjuangan hidup, khususnya melalui pengalaman para tokoh Aceh mencapai kesuksesan, yang selalu diraih melalui kerja keras, belajar serius, tanpa peduli dengan gengsi.

Menurutnya, orang Aceh sesungguhnya terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan tetap kuat dalam mempertahankan aqidah. Ia berharap bidang studi “Global Kompetensi” dapat dikembangkan bagi generasi muda Aceh. Pemerintah Aceh sangat antusias mendorong generasi muda Aceh belajar hingga ke seluruh dunia melalui program Aceh Carong dan Aceh Teuga. Fasilitas beasiswa diberikan oleh Pemerintah Aceh dan juga dari lembaga lain. Pemerintah Aceh juga memiliki program Aceh Meudab untuk memperkuat khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai Islam. “Kita terus mendorong masyarakat Aceh untuk peduli dengan perkembangan global, tapi nilai budaya lokal tidak boleh hilang,” tegasnya.

Dr. Rizal Sukma, Duta Besar RI untuk kerajaan Inggris (2016-2020), mengemukakan pentingnya seseorang memiliki keinginan yang kuat (*determination*) untuk mencapai sesuatu, agar kemudian menjadi daya dorong untuk berusaha. Sebagai Duta Besar yang memiliki latar belakang keilmuan Hubungan Internasional, seringkali ia mengalami *conflict feeling* dalam hal banyaknya narasi tentang kejayaan Aceh di masa lalu *glorification of the past*. Menurut hal ini merupakan modal dasar dan penting untuk kita membangun narasi kepahlawanan dan kehebatan masa kini (kontemporer).

Menurutnya, posisi Aceh dalam pembentukan negara Indonesia penting dan tidak boleh diabaikan ataupun dilupakan. Kenyataan tersebut perlu ditanamkan pada generasi kini, terkait tempat dan peran Aceh dalam pembentukan negara Indonesia. “Aceh tidak diciptakan oleh Indonesia, tetapi Aceh menciptakan Indonesia,” tegasnya.

Ia menilai kondisi SDM Aceh masih memprihatinkan, dibanding daerah lain. Hal ini antara lain terlihat dari beberapa indikator, antara lain: *Data development index*, tingkat prestasi, *health services* di Aceh tidak memadai dan skor TPS (Tes Potensi Skolastik) di Aceh sangat

rendah, bahkan lebih rendah dari Papua, terutama dalam penalaran umum. “Kemampuan nalar dari mereka yang mengambil tes TPS ini berdasarkan ujian masuk PTN. Ditengarai adanya problem dengan kemampuan reasoning/nalar para mahasiswa dan anak-anak didik di Aceh,” ujarnya.

Dalam hal ini dituntut kontribusi nyata diaspora. Bagaimana Aceh dan diaspora dapat memberikan kontribusi. Dr. Rizal mengemukakan, problem yang hadapi adalah problem “*how to deal with this dominant perception*” mengenai Aceh. Ketika kata Aceh muncul, kata berikutnya yang muncul pertama adalah konflik. “Aceh adalah tempat the longest interagency conflict, konflik terpanjang di Indonesia. Kemudian yang ke-dua tsunami dan yang ke-tiga yang kerap muncul diasosiasikan dengan Aceh adalah Syariah, pelaksanaan Syariah,” ujarnya.

Menurut Rizal, karakter positif orang Aceh yang perlu dipertahankan adalah sikap argumentatif, komitmen dan perlu mengurangi perilaku emosional dan curiga terhadap pengaruh luar. Aceh perlu tetap terbuka terhadap kritik. bagi mahasiswa di luar negeri untuk mengikuti perkembangan internasional. Aceh perlu menarik investasi dari dunia Barat untuk membangun Aceh dengan modelnya sendiri.

Prof. Dr. T. Abdullah Sanny, peneliti di LEMHANNAS dan CIDES, menekankan pentingnya Aceh melakukan *disruptive innovation* dalam pembangunan Aceh saat ini, baik dari sisi teknologi ICT (*Information Communication Technology*), Pasca Pandemi Covid-19 dan *personal disruptive*. Semakin banyak manusia frustrasi, pengangguran dan kemiskinan bertambah. Oleh karena itu, perlu dilakukan *disruptive innovation*, membangun inovasi inovasi baru dalam pembangunan, khususnya Aceh di era pandemi ini.

Ia menilai ada beberapa perubahan pola kekuasaan. Dari sistem kenegaraan demokrasi beranjak ke sistem korporasi murni (*corporate capitalism*), kemudian saat ini juga berjalan sistem negara korporasi (*state capitalism*). Perubahan menjadi neokolonialisme ini memunculkan problem ketidakpastian global. “Banyak pengusaha yang mendirikan partai., menjadi politisi. Urusan bisnis bercampur dengan urusan negara,” urainya.

Di tengah munculnya Rusia dan Cina sebagai kekuatan baru, tidak dapat dipungkiri Sistem Islam akan muncul. Saat ini Islam semakin populer di mata dunia, termasuk di Inggris, Perancis, Jerman, Amerika dan Australia. Ke depan, Islamic system ini akan menjadi bagian dari sistem kenegaraan. Pandangan ini merupakan pandangan futuristik. Bagaimana orang Islam mengembangkan ekonomi, merupakan tuntutan agama Islam yang Rahmatan lil ‘Alamiin. “Islam akan menjadi *disruptive innovation*, sistem dahsyat menyangkut ekonomi Islam, keuangan Islam, makanan halal dan fashion,” jelasnya.

Menurut pakar pembangunan bawah tanah yang juga terlibat dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan MRT di Kuala Lumpur ini, berharap Aceh menjadi pusat halal *industry*. Yayasan Beudoh Gampong yang ia bangun 5 tahun lalu merupakan salah satu global *disruptive innovation* untuk membangun Aceh. Disamping itu, Aceh bagian dari *Hub One Belt One Road (OBOR) China*, karena China telah mempelajari sejarah strategis Aceh. Banda Aceh merupakan bagian dari OBOR China. Sumberdaya alam Aceh luar biasa. Kita tidak rela didominasi bangsa lain.

“Aceh memerlukan orang-orang yang berpikir untuk menghasilkan pemikiran pemikiran agar menguasai energi, sumberdaya alam dan lain sebagainya. Pendidikan perlu diusahakan ke

arah kreatif, inovatif agar dapat melakukan perubahan drastis. Tidak bisa perubahan yang sekedarnya untuk mencapai *performance* yang tinggi ataupun untuk mencapai politik hebat Aceh. Diaspora China dan India membuat China dan India hebat. Diaspora Aceh harus menjadi bagian dari usaha perubahan ini,” tegasnya.

Said Zaidansyah mengapresiasi organisasi Diaspora Global Aceh yang bersifat inklusif dalam kriteria sebagai Diaspora Aceh. Beberapa sifat orang Aceh dari pandangan salah satu *bankers* Aceh terkemuka ini adalah religious, argumentatif, petarung, bersemangat tinggi, egaliter, individualis dan terbuka. Ia mencontohkan salah satu sifat adaptif orang Aceh di luar negeri, dari salah satu diaspora Aceh di Pilipina, Ilyas Ismail, seorang Aceh beristrikan orang Mindanao. Ia dapat memberikan pengaruh cukup besar dalam masyarakat, sehingga Presiden Marcos membuat 2 mesjid besar di Manila. Dengan segala keterbatasannya, ia mampu mengembangkan Islam di Manila.

Ia memberikan contoh lain, yaitu Tokoh Malaysia asal Aceh di Kuala Lumpur, Dato' Seri Sanusi bin Juned dipercaya menjadi Menteri Besar di Kedah, Sekjen UMNO dan Presiden IIU. Disamping itu banyak orang Aceh di Malaysia, Di Chow Kit, di toko-toko orang berbahasa Aceh. Pemilik toko di Chow Kit kebanyakan orang Aceh. Orang Aceh individualis, sukses karena dirinya sendiri. “Sifat khas orang berdaya saing tinggi adalah menampilkan *growth mentality*, percaya diri, pantang menyerah, berjejaring dan komunikatif. Bila kita simak sifat-sifat orang Aceh tidak jauh berbeda dengan sifat khas orang berdaya saing tinggi. Tidak mengherankan banyak orang Aceh sukses, diantaranya Bapak Ibrahim Risyad, pengusaha Aceh di masa Orde baru,” tuturnya.

Said melihat ada tiga tantangan ke depan yang bisa dilakukan Diaspora Aceh untuk membangun Aceh. Pertama, bagaimana menjembatani kondisi Aceh saat ini dengan Diaspora Aceh yang memiliki potensi tinggi. Kedua, Diaspora Aceh perlu melakukan tindakan nyata secara terstruktur dan sistematis untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di Aceh. Ke-tiga, Pemerintah Daerah maupun masyarakat Aceh di Aceh perlu membuka ruang untuk Diaspora Aceh secara terstruktur dan sistematis untuk dapat berkontribusi nyata untuk pembangunan daerah.

Pakar studi hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Dr. Teuku. Rezasyah, melihat negara negara yang memiliki daya saing tinggi seperti Jepang, RRC, Taiwan, mereka mampu menerapkan beberapa prinsip hidup secara konsisten dan berkelanjutan, yaitu prinsip ekonomi berbasis pasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, meritokrasi, taat hukum dan berbudaya damai.

Reza menjelaskan perlunya belajar dari negara Asia timur, Pendidikan dasar lebih ditekankan pada Mata Pelajaran *Science, Technology, Engineering, Mathematics* (STEM Untuk sekolah kejuruan (SMK), kurikulum terintegrasi dengan dunia usaha dan industri di lingkungan mereka, khususnya pada sektor-sektor Pertanian, Peternakan, Pertambangan, Perkebunan, Pariwisata, Kelautan, dan Lingkungan Hidup. Budaya mengenal Iptek hendaknya dibangun sejak dini, melalui berbagai praktik dan ajang kompetisi terbuka. Dana Iptek yang tersedia diberbagai instansi agar terfokus pada bidang- bidang tertentu saja, guna menghindari duplikasi. Sistem meritokrasi, perlu digunakan dalam menseleksi pejabat publik sesuai kriteria kapabilitas dan akseptabilitas secara teruji, disertai sistem penjenjangan dan pengembangan karir yang pasti. Disamping itu, aspek hukum perlu mendapat perhatian besar. Hukum perlu dimuliakan dengan usaha usaha berikut: Memuliakan hukum berawal

dari rumah tangga dan lingkungan keluarga; Negara sigap dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik kejahatan, termasuk kejahatan kerah putih, yang berpotensi menjerat masyarakat, sehingga mengganggu ketahanan ekonomi keluarga; Pengambilan keputusan publik berbasis riset, dengan rancangan yang dibuat secara filosofis dan sistematis, serta telah dikonsultasikan dengan masyarakat; dan media massa turut bertanggung jawab, dengan tidak sembarangan mengumbar masalah-masalah hukum ke publik.

## 2.5. Menjaga Leuser, Paru-Paru Dunia

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, DGA bekerjasama dengan “Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES)”, menyelenggarakan webinar dengan tema: “Menjaga Leuser, Paru- Paru Dunia: Dukung Transisi Energi Capai Target NZE”, 28 Oktober 2022. Sebagai Keynote Speaker adalah Ir. Sarwono Kusumaatmadja. Sebagai narasumber:; Laksmi Dewanti, Dirjen Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK: “Mencari Solusi Optimalisasi Pengelolaan Leuser dan *Illegal Mining* Sebagai Upaya Pengendalian Perubahan Iklim”; Paul Butarbutar (ICRES): Dekarbonisasi dalam pengelolaan energi dan optimalisasi Ekosistem Leuser; Dr. Gabriella Firdhiyanti, *Lecturer* di Central Lancashire University UK: “Pandangan Cendekiawan Muda Aceh dalam Pemanfaatan SDA Aceh di Kawasan Leuser, bagi Lingkungan dan Energi; Rudi Putra, Forum Konservasi Leuser: Melestarikan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai paru-paru dunia, apa manfaatnya bagi Aceh dan Indonesia”; Ir. Mahdinur, Kadis ESDM Aceh: “Potensi Pertambangan di Kawasan Leuser - pro dan kontra pemanfaatannya untuk ekonomi dan lingkungan”. Bertindak sebagai moderator Ir. Farida Zed.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan transisi ke energi baru dan terbarukan sudah tertuang dalam Peraturan Presiden, dimana dalam tahun 2025 pemanfaatan energi terbarukan akan mencapai 23 %. Tahun 2060 diharapkan energi di Indonesia sudah berbasis energi terbarukan. Namun percepatan transisi energi perlu mendapat dukungan dana internasional. Energi terbarukan sudah mulai dimanfaatkan antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Panas Bumi.

Kawasan ekosistem Leuser di Aceh merupakan kawasan strategis nasional bisa menjamin keberlangsungan sumber-sumber energi yang ada di tanah, untuk bisa menjamin ketersediaan air untuk pembangkit tenaga air di sekitar kawasan konservasi. Sebagaimana diketahui, Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan konservasi karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Taman Nasional Gunung Leuser mendapatkan status sebagai warisan ASEAN atau ASEAN Heritage pada tahun 1984 merupakan pengakuan dan deklarasi negara-negara anggota ASEAN terhadap taman nasional dan suaka alam tertentu berdasarkan keunikan keberagaman dan nilai-nilai luar biasa yang dimiliki dalam konteks ASEAN.

Sebenarnya Taman Nasional Gunung Leuser memiliki potensi yang besar untuk pengembangan energi panas bumi, yaitu menempati urutan ke-8 terbesar di Indonesia. Namun pemanfaatan tersebut masih terkendala oleh status Gunung Leuser yang berada di kawasan konservasi. Dengan demikian pemanfaatan energi panas bumi di kawasan tersebut memerlukan studi analisis dampak lingkungan yang komprehensif. Pemikiran-pemikiran tentang Lesuer sebagai paru-paru dunia bisa menjadi masukan dalam forum G-20 yang akan diadakan di Indonesia.

## 2.6. Ekonomi Sirkulasi Yang Rahmatan Lil Alamin

Isu tentang Ekonomi Sirkulasi menjadi topik dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2022. FGD diselenggarakan oleh Komite Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi DGA dengan tema “Ekonomi Sirkulasi Yang Rahmatan Lil Alamin” menghadirkan narasumber Prof. Dr. TA. Sanny dan moderator Prof. Dr. T. Yuri Zagloel.

Teuku Abdullah Sanny menekankan perlunya kesadaran/kewajiban bagi perusahaan/masyarakat untuk menerapkan energi hijau dalam menghasilkan produk. Pendekatan ekonomi sirkuler dapat mengurangi limbah sebanyak 15% hingga 52%. Untuk itu perlu mengurangi emisi karbon sebesar 126 juta ton, serta penggunaan air sebesar 6,3 miliar meter kubik pada tahun 2030.

Penerapan ekonomi pada kelima sektor prioritas berpotensi menghasilkan Produk Domesik Bruto (PDB) sebesar Rp593 T – Rp638 T pada 2030. Penerapan sirkular ekonomi akan menciptakan banyak lapangan kerja serta menghemat pengeluaran rumah tangga hingga 9% atau sekitar 4,9 juta per tahun pada 2030. Pergeseran dari Ekonomi Linier ke Ekonomi Sirkuler menekan adanya proses Daur Ulang. Ekonomi Sirkuler sebagai upaya untuk menjaga bumi agar tetap lestari. Untuk itu baik masyarakat maupun perusahaan harus peduli terhadap hal ini dan sekaligus membangun *Green Economy*. Ekonomi Sirkuler telah diujicobakan diterapkan oleh Yayasan Beudoh Gampong (YBG) di Aceh, khusus di Montasiek Aceh Besar untuk bidang peternakan sapi dan persawahan sehingga menghasilkan beras berkualitas dengan merek YBG.

Dalam Diskusi Peralihan dari ekonomi linier ke sirkuler memerlukan perubahan kultur dan *mindset*. Hal ini melibatkan *stakeholder* terkait seperti Geuchik, Perangkat Gampong, Komunitas dan sebagainya. Dukungan permodalan diarahkan ke sistem perbankan, mengingat citra koperasi masih kurang baik. Membentuk kelompok petani milenial di bawah usia 40 tahun. Kerjasama berbagai pihak terutama antara DGA dan YBG untuk menggalakkan penerapan Ekonomi Sirkulasi di Aceh. Perlu mendorong orang Aceh belajar tentang pertanian dan peternakan ke Jawa Barat dan juga keluar negeri seperti Jepang dan New Zealand.

## 2.7. Ekonomi Sirkulasi Menghasilkan Energi Bersih dan Kualitas Air Tanah yang Baik.

Sebagai tindak lanjut dari FGD sebelumnya tanggal 8 April 2022, dilakukan FGA (Focus Group Action), pada tanggal 22 April 2022, dengan tema: “Ekonomi Sirkulasi Yang Menghasilkan Energi Bersih dan Kualitas Air Tanah Yang Baik”. Kegiatan ini diselenggarakan secara online diikuti 20 orang.

FGA dimoderatori oleh Dr. Ir. M. Dirhamsyah.

Ketua Umum DGA, Mustafa Abubakar menyambut positif kegiatan FGA yang dilakukan oleh Komite Bidang RIT dan menekankan perlu keluaran yang nyata terhadap kegiatan-kegiatan ini dan memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait. Untuk implementasinya bisa dimulai dengan program piloting terlebih dahulu, jika berhasil bisa diteruskan dengan kegiatan yang lebih luas.

Prof. T. Yuri Zagloel menilai masalah mendasar mengapa Ekonomi Sirkuler menjadi semakin

penting antara lain sumber daya alam yang semakin terkuras, biodiversitas di hutan dan laut semakin terancam, dan sistem finansial yang secara berkala mengalami turbulensi.

Ekonomi Sirkulasi pada dasarnya merupakan siklus antara *Make/Remake* dan *Use/Reuse*. Mengutip dari TU Delft, Ekonomi Sirkulasi bertujuan untuk secara radikal membatasi ekstraksi bahan mentah dan produksi limbah. Hal ini dilakukan dengan cara memulihkan dan menggunakan kembali sebanyak mungkin produk dan bahan, secara sistemik, berulang-ulang. ekonomi sirkular adalah ekonomi mengikuti siklus "*make/remake – use/reuse*".

Ia menjelaskan tentang mekanisme penciptaan nilai tambah pada ekonomi sirkulasi dengan mengacu pada pendapat Ellen MacArthur Foundation yang meliputi : *The Power of Inner Circle, The Power of Circling Longer, The Power of Cascaded Use, dan The Power of Pure Circles*. Selanjutnya dijelaskan tentang Mesin Kompresi Biogas Skala Rumah Tangga (SIKOMBI), yang berasal dari kotoran sapi dewasa. Pembuktian unjuk kerja SIKOMBI memerlukan pengujian lanjutan. Pengenalan SIKOMBI sebagai mesin kompresi Biogas diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara luas di masyarakat.

Ir. Ariel Arianto. MSc. Agr menjelaskan tentang Riset dan Inovasi Dalam Upaya Mendukung Ekonomi Sirkulasi Menumbuhkan Pemanfaatan SDA Ramah Lingkungan. Inovasi Soft Kapsul Rumput Laut memiliki potensi ekonomi tinggi, permintaan mencapai 3 Milyar. Ekonomi linier dan ekonomi sirkulasi, *dpi-Sawit*. Dimana ekonomi linear berpola *take-make-dispose* dan ekonomi sirkulasi pada pola *make-use-recycle*. Ia menekankan pentingnya mengelola secara berkelanjutan ekonomi linier dan ekonomi sirkulasi, misalnya dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan Sapi dan Sawit. Adanya potensi pakan ternak dari kebun sawit dan industri sawit.

Beberapa butir hasil diskusi adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan terintegrasi Sapi dan Sawit sangat relevan di Aceh dan sangat berdampak pada peningkatan perekonomian rakyat. Untuk itu diperlukan Kerjasama yang sinerjis antara Kampus, Dinas dan Stakeholder terkait.
- Lahan sawit dapat dimanfaatkan untuk penggembalaan ternak, hal ini dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada.
- Perlu mendorong masyarakat untuk lebih memahami permasalahan lingkungan dan perlu dilakukan secara gotong royong untuk menerapkan Ekonomi Sirkulasi.
- Perlu dilakukan kolaborasi antar berbagai pihak dan bisa dimulai dengan model dulu (*piloting*) yang kemudian direplikasi.

## **2.8. “Mengembangkan Sirkular Ekonomi Melalui Integrasi Kebun Sawit – Peternakan Sapi di Aceh”**

FGA diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2022, dengan narasumber Dr. Windu Negara dan Farid Reza. Sebagai moderator Prof. Dr. T. Yuri Zagloel. Dr. Windu Negara, peneliti pada riset peternakan BRIN memaparkan tentang Integrasi Sapi – Sawit sebagai Salah Satu Implementasi Ekonomi Sirkular.

Sistem Integrasi Sapi Sawit (SISKA) memanfaatkan limbah produk kelapa sawit tersebut bisa mendapatkan nilai ekonomi dengan menjadikannya sumber pakan pada ternak sapi. Timbal

baliknya, ternak sapi akan menghasilkan kotoran/ pupuk organik yang sangat bermanfaat untuk tanaman sawit. Manfaat SISKA pada sisi peternakan akan sangat membantu pada proses fattening, breeding, maupun meat processor pada ternak sapi. Sementara dari sisi perkebunan sistem SISKA tersebut bermanfaat untuk: peningkatan nilai ekonomi perkebunan melalui pemanfaatan limbah industri dan kebun sawit, mengurangi biaya herbisida 24-43%, peningkatan produksi buah segar 15- 25%, mengurangi biaya pemupukan 30-40%, dan pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan. Selain itu sistem SISKA juga selaras dengan Rencana Aksi Nasional Kebun Sawit Berkelanjutan yang merupakan program pemerintah.

Sistem Integrasi Sapi Sawit (SISKA) tidak semata soal ternak sapi maupun sawit, tetapi lebih besar untuk kepentingan bangsa. Besarnya impor daging Indonesia (70%) disebabkan oleh kenaikan kelas menengah (20%). Produk sampingan kelapa sawit, berupa daun, pelepah, tandan kosong, serat perasan, Impur sawit, bungkil, sangat cocok untuk pakan ternak sapi karena kandungan proteinnya tinggi. Hambatan pada implementasi SISKA disebabkan informasi yang salah, kurangnya penerimaan pemilik kebun, kurangnya regulasi dan minimnya permodalan.

Farid Reza, seorang pengusaha muda pemula, menceritakan pengalamannya mengelola peternakan sapi pada lahan sawit. Ia mengelola peternakan sapi pada lahan kebun sawit seluas 3.000 ha yang terdiri dari tanaman produksi seluas 2.100 ha, dan tanaman non produksi seluas 200 ha. Produk pakan ternak solid dan tambahan diantaranya di proses menggunakan mesin decanter berkapasitas 8 ton/jam dan kapasitas pakan ternak solid 240kg/jam. Ternak sapi diberikan konsentrat pada pagi dan sore hari sedangkan pada siang hari diberikan rumput gajah. Peternakan melakukan breeding sapi kampung dengan menggunakan sapi Bali pejantan. Pemberian pakan mandiri dilakukan di pekarangan kebun dan tambahan pakan solid dipekarangan kandang sapi. Saat ini baru terdapat 15 ekor sapi untuk *fattening* dan 140 ekor sapi untuk breeding. Ternak sapi hanya dilepaskan di lahan dari pukul 08.00 - 16.00 setelah itu dimasukkan kembali ke kandang, dan secara rutin dilakukan pemeriksaan kesehatan, kebuntingan dan masa birahi sapi.

## **2.9. Governance Best Practices in International Business and Non-Profit Organization.**

Tata Kelola yang baik (*Good Governance*) sangat penting untuk kemajuan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, baik untuk usaha kecil maupun usaha besar. Hal ini merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan pemerintah atau sektor swasta. Dalam masyarakat global Tata Kelola yang baik meningkatkan keuntungan ekonomis dan mempercepat transformasi ekonomi. Tata Kelola yang baik diperlukan mendorong pembangunan berkelanjutan untuk bisnis internasional dan organisasi nir laba. Latar belakang ini yang mendorong diselenggarakannya webinar dengan tema: "*Governance Best Practice in International Business and Non Profit Organization*", pada 30 Juni 2022, secara daring.

Sebagai Narasumber Irwan Mahjudin Habsjah, Kepala Komite Monitoring Bank BTPN dan Said Faisal *Advisor on Disaster Risk Management and Crisis Response*. Sebagai moderator Gesckya Shalsabilla DW. Kegiatan ini merupakan Kerjasama antara PUMA IR dan DGA. Irwan Mahjudi, Komisariss BTPN, GCG, menurut definisi World Bank, adalah kumpulan hukum, peraturan, kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan, bekerja secara efisien, dan dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka

panjang yang berkesinambungan. *Corporate Governance* atau *Governansi Corporate* meliputi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain. GCG memberikan struktur untuk mencapai tujuan, dan memonitor kinerja.

Tujuan dari GCG adalah: menempatkan *check and balance* di dalam struktur perusahaan, membedakan tindakan eksekusi dan *oversight*, mendelegasikan secara tepat, menciptakan transparansi kepada pihak di luar perusahaan. Melalui penerapan GCG maka pengambilan keputusan menjadi efisien, memperjelas tanggungjawab, memastikan akuntabilitas, serta memberikan hak kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Penerapan GCG memiliki keuntungan tidak langsung bagi perusahaan, antara lain: :Image Perusahaan, Kesesuaian dengan praktik terbaik internasional, meningkatkan kepercayaan investor, dan transparansi yang lebih baik. Adapun manfaat langsung: Efisiensi operasional, akses ke pasar modal, dan keunggulan kompetitif.

Said Faisal yang telah berkecimpung dalam bidang kebencanaan menganggap GCG bukan hanya untuk perusahaan tetapi juga dapat diterapkan dalam organisasi non profit atau nir laba. Ia menganggap penting bagi semua pihak untuk memahami kebencanaan, mengingat Indonesia boleh dikatakan seperti super-market-nya bencana alam, dari mulai gempa, tsunami, angin topan, likuifaksi, dan lain-lain. Korban bencana tsunami Aceh hampir sama dengan korban pandemi Covid

-19, bedanya bencana Aceh yang menelan korban ratusan ribu hanya terjadi dalam 30 menit, sementara korban covid memerlukan waktu 2 tahun. Indonesia harus paham dalam mengelola bencana. Ketika ekonomi semakin terhubung, maka dalam menghadapi bencana bukan hanya soal memberikan bantuan, tetapi juga ada dampak ekonomi karena hancurnya rantai pasok industri suatu negara yang terlanda bencana.

#### 2.10. Silaturahmi Waketum dengan Sagoe Mesir, Maroko dan Turki

Kunjungan Waketum DGA Dr. Surya Darma dalam rangka menghadiri COP 27 sebagai panelis atas undangan Komisi Uni Eropa di Sharm El Sheikh, Mesir pada tanggal 12-23 Nopember 2022 dan melakukan silaturahmi sekaligus sharing dengan DGA Sagoe Mesir, Maroko dan Turki.

### 3. LAIN-LAIN

#### 3.1. Bantuan Dhuafa Diaspora Global Aceh

DGA juga melakukan beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain dalam rangka menyambut Idul Fitri, memberikan bantuan kepada orang miskin ekstrim di Aceh melalui petugas Gampong, Keuchi/ Tuha Peut/ Tgk. Dayah Pesantren. Bantuan diberikan kepada 41 orang, dengan nominal bantuan Rp 500.000,- per orang. Total bantuan Rp 20.500.000.

#### 3.2. Bantuan Pengobatan Mahasiswi Aceh di Mesir.

Dispora Global Aceh juga mengkoordinir bantuan untuk keperluan pengobatan sebesar Rp 20 juta mahasiswi tingkat 4 Universitas Al Azhar, Fakultas Bahasa Arab di Cairo Mesir, yang sedang menderita komplikasi penyakit infeksi dinding usus.